

## REDD+ Terkendala Masalah Penegakan Hukum

Penerapan konsep REDD+ (*Reducing Emission and Deforestation and Degradation plus*) yang seharusnya sudah berjalan sejak 2005, sampai saat ini jalan di tempat. Bahkan implementasinya juga belum terwujud. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Deddy Hadriyanto, mengatakan belum terwujudnya REDD+ disebabkan lambatnya pembuatan konsep yang diterapkan pemerintah Indonesia, terutama terkait masalah fundamental seperti penegakan hukum, tata ruang dan kesadaran pemerintah daerah setempat.

"*Law enforcement* belum ditegakkan, bahkan Bupati yang membuat kebijakan saja ikut terlibat dalam kejahatan hutan tersebut, para penegak hukumnya juga begitu," katanya ditemui di sela lokakarya *On Tropical Wetland Ecosystem of Indonesia* di Bali, Senin (11/4).

Dia mengakui masih adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak sinkron satu sama lainnya. Bahkan pembuat kebijakan yaitu pemerintah daerah (pemda), tidak mengetahui konsep REDD+ tersebut.

Selain itu, Indonesia terkesan lambat menyusun kebijakan penerapan REDD+ seperti masalah pembiayaan yang belum jelas. Jika melihat Brasil, kata dia, salah satu proyek yang berhasil di Manaus dengan luas 580 hektare.

Dana yang diterima Brasil, katanya, ditampung melalui satu bank yang dikelola oleh PBB khusus perihal perubahan iklim, kemudian dibagi ke dana abadi, dana infrastruktur dan dana operasional untuk dibagikan ke masing-masing daerah sesuai kebutuhan.

"Misalnya kampung A butuh untuk peningkatan kesehatan maka didirikanlah rumah sakit di sana, atau kampung B butuh pengembangan komunikasi maka dibangunlah jembatan di sana," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Senior CIFOR Daniel Murdiarso. Dia mengatakan banyak gubernur salah persepsi mengenai kebijakan REDD+. Mereka menyangka akan diberikan banyak uang oleh program ini.

Oleh karena itu, kata dia, tata kelola harus diperjelas siapa yang berhak untuk menerima pendanaan tersebut. "Selain itu, konsep tata ruang harus segera diterbitkan demi kepastian hukum dan persamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat," kata dia.

REDD diperuntukkan bagi negara berkembang yang kaya akan hutan tropis. Pihak donor sudah berkomitmen mendonasikan sekitar US\$5 miliar untuk mendanai upaya yang dilakukannya negara berkembang ini. **Tria Dianti**